

Signifikasi Wawasan Nusantara Dalam Membangun Warga Negara Yang Baik Di Era Globalisasi

Afifah Az Zahra Harahap¹, Nayla Sagita², Yerni Maria Pakpahan³

Program Study Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Samudra, Langsa, Indonesia.

¹Afifahazzahrahp2806@gmail.com, naylasagita1176@gmail.com,
yernipakpahan76@gmail.com

Abstrak Globalization has a significant impact on national life, one of which is marked by the decline in the spirit of nationalism and the increasing tendency of individualism. In this situation, the Indonesian archipelago perspective has a vital role as a way of life for the Indonesian nation that is based on the values of Pancasila and the 1945 Constitution, in order to strengthen unity in facing global challenges. This article reviews the importance of the Indonesian archipelago perspective in forming the character of ideal citizens, which is reflected through an attitude of love for the homeland, loyalty to the state, tolerance, and upholding democratic values. In addition, the discussion also emphasizes the importance of the active role of society in maintaining national identity through education, social involvement, and compliance with legal regulations. By making the Indonesian archipelago perspective the foundation of nationality, it is hoped that the noble values of the Indonesian nation will be maintained amidst the dynamics of globalization.

Keyword Indonesian insight, globalization, good citizens, nationalism, national character

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).



Abstrak Globalisasi memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kehidupan berbangsa, salah satunya ditandai dengan menurunnya semangat nasionalisme dan meningkatnya kecenderungan individualisme. Dalam situasi ini, wawasan nusantara memiliki peran vital sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia yang bersumber dari nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, guna memperkuat persatuan dan kesatuan dalam menghadapi tantangan global. Tulisan ini mengulas pentingnya wawasan nusantara dalam membentuk karakter warga negara yang ideal, yang tercermin melalui sikap cinta tanah air, kesetiaan kepada negara, sikap toleran, serta menjunjung nilai-nilai demokrasi. Selain itu, pembahasan juga menekankan

pentingnya peran aktif masyarakat dalam menjaga identitas nasional melalui jalur pendidikan, keterlibatan sosial, dan kepatuhan terhadap peraturan hukum. Dengan menjadikan wawasan nusantara sebagai landasan kebangsaan, diharapkan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia tetap terpelihara di tengah dinamika globalisasi.

Keywords Wawasan nusantara, globalisasi, warga negara yang baik, nasionalisme, karakter bangsa

Pendahuluan

Globalisasi membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Informasi dan budaya asing yang semakin mudah diakses mendorong meningkatnya sikap individualisme di kalangan masyarakat, serta melemahkan rasa nasionalisme. Sebagai mahasiswa calon pendidik, penulis merasa penting untuk mengangkat tema ini karena wawasan nusantara berperan strategis dalam memperkuat identitas nasional di tengah arus globalisasi. Melalui pemahaman wawasan nusantara, diharapkan masyarakat Indonesia, khususnya generasi muda, mampu mempertahankan keutuhan bangsa dan membangun karakter warga negara yang baik.

Wawasan nusantara, menurut Yuniar Mujiwati (2020) adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Konsep ini mengajarkan pentingnya kesatuan dalam keberagaman untuk mencapai tujuan nasional. Sayangnya, kurangnya pemahaman dan penerapan wawasan nusantara di kalangan masyarakat saat ini menyebabkan melemahnya rasa kebangsaan dan solidaritas sosial.

Berdasarkan studi literatur, wawasan nusantara tidak hanya menjadi panduan dalam pengambilan keputusan berbangsa dan bernegara, tetapi juga menjadi pilar utama dalam memperkuat ketahanan nasional di tengah tantangan global (Mujiwati, 2020; Pringadhi & Najicha, 2023). Oleh karena itu, makalah ini bertujuan untuk membahas signifikansi wawasan nusantara dalam membangun karakter warga negara yang baik di era globalisasi, agar nilai-nilai kebangsaan tetap terjaga dan dapat diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat.

Pengaruh globalisasi membawa perubahan besar yang berdampak pada berbagai aspek kehidupan dalam berbangsa. Informasi dan budaya asing yang semakin mudah diakses membuat rasa nasionalisme serta meningkatnya sikap dibutuhkan pilar-pilar yang dapat menopang agar dapat berdiri dengan kokoh dan kuat.¹ Berdasarkan individualisme di kalangan masyarakat. Wawasan nusantara sebagai gambaran bangsa Indonesia yang

¹ Johannes Johnny Kojnja 2022, *SOSIALISASI EMPAT PILAR BERBANGSA DAN BERNEGARA DI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA YADINU MASBAGIK KECAMATAN MASBAGIK LOMBOK TIMUR*, *jurnal komplikasi hukum* volume 7 nomor 2, 283-300.

berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, memiliki peran penting dalam menjaga keutuhan NKRI serta membentuk warga negara yang bertanggung jawab.

Namun, kurangnya pemahaman dan penerapan konsep ini menyebabkan semakin berkurangnya kesadaran dan kepedulian terhadap negara. Oleh karena itu, makalah ini membahas signifikansi wawasan nusantara dalam membangun karakter warga negara yang baik di tengah tantangan globalisasi, agar nilai-nilai kebangsaan tetap terjaga dan dapat diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat.

Pembahasan

Wawasan Nusantara

Wawasan berasal dari kata wawas, yang dalam bahasa Jawa berarti melihat atau memandang, dan kemudian ditambahkan akhiran "an", yang secara harfiah yang berarti cara melihat, tinjau, atau penglihatan. Wawasan nusantara adalah cara melihat bangsa dengan mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan individu, kelompok, atau golongan tertentu. Wawasan Nusantara digunakan sebagai pandangan, dorongan, motivasi, dan garis besar untuk proses pengambilan keputusan dan pemutus kebijakan, serta untuk penyelenggaraan negara dari tingkat pusat hingga daerah, serta untuk seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Menurut Wan Uswan, wawasan nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam mengenai diri dan tanah air sebagai negara kepulauan dalam segala aspek kehidupan yang beragam. (Yuniar Mujiwati, 2020)².

Wawasan nasional sangat penting bagi pemerintah dan rakyat untuk beroperasi. Untuk menjamin kelangsungan hidup, keutuhan wilayah, dan jati diri bangsa, wawasan nasional adalah cara suatu bangsa melihat dirinya sendiri dan lingkungannya melalui eksistensinya yang serba terhubung dan pembangunannya di lingkungan nasional, regional, dan global. Wawasan Nusantara adalah penglihatan dari suatu negara mengenai identitas diri dan juga lingkungannya yang dijelaskan melalui sejarah bangsa suatu negara yang sesuai dengan kondisi negaranya untuk mencapai tujuan dan cita-cita. Sebagai masyarakat perlu menciptakan sikap toleransi dan yang paling penting meningkatkan wawasan Nusantara, karena dapat menjadi solusi untuk meminimalkan kerugian yang muncul disebabkan karena banyaknya perbedaan budaya maupun kepercayaan yang ada di Indonesia.

Pemahaman bahwa setiap budaya itu memiliki kedudukan yang setara serta memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing tanpa menjatuhkan budaya dan kepercayaan yang lain, Negara Indonesia juga selalu mengutamakan persatuan dan kesatuan. Hal ini bisa kita lihat sendiri semboyan Indonesia yaitu "Bhinneka Tunggal Ika" yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Hal ini adalah salah satu bukti persatuan dan kesatuan seluruh masyarakat Indonesia tentang identitas dirinya. Dengan adanya politik, sosial, budaya, ekonomi, dan pertahanan serta keamanan masyarakat Indonesia

² Yuniar Mujiwati *Serba-serbi wawasan kebangsaan Lembaga academia & research institute perum Sekar indah II*, 2020:30.

akan menjadi satu kesatuan, memiliki nasib yang adil, sebangsa dan memiliki tekad untuk pembangunan nasional.

B. Empat Pilar Kehidupan

Negara Indonesia memiliki pilar-pilar yang ada dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Empat pilar ini sangat penting untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Tidak hanya Pancasila sebagai dasar pemersatu bangsa dan UUD 1945 sebagai konstitusi negara, pilar ini dianggap belum cukup untuk membangun kehidupan berbangsa dan bernegara karena ini menjadi 4 pilar yang berisi Pancasila, UUD 1945, Bhineka tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Empat pilar ini diusulkan oleh alm. Taufik Kiemas yang menganggap konsep ini mutlak dan juga tidak bisa terpisahkan dalam tujuan untuk menjaga dan membangun keutuhan bangsa Indonesia. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini Pancasila dan UUD 1945, wawasan nusantara adalah cara bangsa Indonesia melihat dirinya sendiri dan bentuk geografisnya dengan mengutamakan kesatuan wilayah dan menghargai kebhinekaan untuk mencapai tujuan nasional.

Berikut 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai patokan untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera

1. Pancasila sebagai ideologi

Dalam kebanyakan kasus, yang dimaksud dengan "ideologi" adalah kumpulan gagasan dan keyakinan yang disusun secara sistematis, disertai dengan arahan tentang cara-cara untuk mewujudkannya. Ideologi adalah pedoman kegiatan untuk mewujudkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Ideologi memuat orientasi pada tindakan, tetapi persepsi yang menyertai orientasi, pedoman, dan komitmen sangat penting dalam memberikan warna pada sikap dan tingkah laku seseorang saat melakukan tindakan, kegiatan, atau perbuatan dalam rangka mewujudkan atau merealisasikan nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi. Pancasila digunakan sebagai landasan pemerintahan negara sebagai dasar. Dalam kasus ini, Pancasila bukan hanya dasar negara dan pemikiran filsafat; itu adalah ideologi, atau gagasan bertindak. Ideologi ini memiliki hubungan dengan masyarakat dan negara. Setiap warga Indonesia yang mencintai bangsanya berhak untuk berpartisipasi dalam proses merevitalisasi Ideologi Pancasila dalam kehidupan nasional dan internasional mereka.

2. Undang Undang Dasar 1945

Untuk memahami dan mendalami UUD 1945, harus memahami pembukaan UUD 1945 dan prinsip-prinsipnya yang penting bagi kehidupan nasional dan internasional. Tanpa memahami pembukaan, tidak dapat memahami pasal-pasalnya dan berbagai undang-undang yang mengikutinya. Beberapa orang membedakan pengertian konstitusi dan undang-undang dasar. Undang-undang dasar hanya mencakup bagian tertulis dari konstitusi. Konstitusi suatu negara mengatur hak dasar dan kewajiban warganya, melindungi mereka dari sewenang-wenang penguasa dan sesama warga. Konstitusi juga

mengatur bagaimana lembaga negara berhubungan dan bekerja, sehingga tercipta sistem kerja yang efektif, efisien, dan produktif sesuai dengan tujuan dan wawasannya.

3. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

Nasionalisme adalah semangat yang mendasari negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuannya adalah untuk melindungi negara dan seluruh tanah air Indonesia, meningkatkan kesehatan masyarakat, meningkatkan kualitas hidup, dan berkontribusi pada ketertiban global yang didasarkan pada kemerdekaan, perdamaian, dan keadilan sosial. NKRI adalah hasil dari pengorbanan jutaan pejuang yang berkomitmen untuk mempertahankan keutuhan negara. Oleh karena itu, NKRI adalah dasar, undang-undang, dan harga mati. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah bentuk negara Indonesia yang memiliki kedua bentuk republik dan negara kepulauan. Kenapa NKRI ada? Karena negara Indonesia terdiri dari banyak pulau, tetapi tetap menjadi satu negara dan bangsa yang bernama Indonesia.

4. Bhineka tunggal Ika

Bhinneka Tunggal Ika berasal dari bahasa Jawa kuno, yang mana kata *bhinneka* merupakan gabungan dua kata *bhinna* dan *ika*, sedangkan *tunggal ika* merupakan gabungan dua kata *tunggal* dan *ika*. *Bhinna* diartikan berbeda-beda dan *ika* diartikan itu sedangkan *tunggal* diartikan satu. Berdasarkan arti kata tersebut. *Bhinneka Tunggal Ika* mengatakan, "Berbeda-beda itu satu itu yang sering kita artikan berbeda tetapi tetap satu jua. Prinsip Indonesia sebagai negara *Bhinneka Tunggal Ika* menunjukkan bahwa meskipun Indonesia memiliki banyak karakteristik yang sangat berbeda dalam hal suku bangsa, etnik, kebudayaan, adat istiadat, bahasa, dan agama yang di peluk oleh masyarakatnya dan hidup dalam negara yang terdiri dari beribu-ribu pulau, mereka tetap terintegrasi dalam kesatuan dan kemanunggalan.³

C. Fungsi Wawasan Nusantara

Sebagai bangsa yang satu, Indonesia memiliki wilayah yang luas dengan berbagai keragaman, dan sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), ada dorongan dan pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara untuk menjadi bangsa yang merdeka. Wawasan nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dan dorongan untuk menentukan kebijaksanaan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Wawasan Nusantara juga membantu memperkuat persatuan bangsa dan negara Indonesia. Ini juga merupakan ajaran dasar yang mendasari kebijakan dan kemajuan Indonesia. Ada beberapa perspektif yang berbeda tentang tujuan wawasan nusantara. Wawasan nusantara

³ Suko Wiyono 2019, EMPAT PILAR KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA SEBAGAI PANDUAN DALAM MEWUJUDKAN MASYARAKAT ADIL MAKMUR BERDASARKAN PANCASILA, jurnal ilmiah Fakultas keguruan dan ilmu pendidikan volume 15 nomor 1 hal 37-52.

melihat ketahanan nasional sebagai konsep yang mencakup pembangunan, pertahanan, dan keamanan serta kewilayahannya. Wawasan nusantara melihat pembangunan nasional sebagai kesatuan politik, sosial, dan ekonomi, sosial, dan politik, serta kesatuan pertahanan dan keamanan. Wawasan nusantara melihat pertahanan dan keamanan sebagai kesatuan geopolitik Indonesia yang mencakup seluruh wilayah dan seluruh kekuatan negara, serta Wawasan nusantara melihat pembangunan nasional sebagai kesatuan yang mencakup pembangunan, pertahanan, dan keamanan.

D. Tujuan Wawasan Nusantara

Tujuan Wawasan Nusantara adalah untuk menanamkan rasa nasionalisme yang mendalam di setiap aspek kehidupan rakyat Indonesia. Ini tidak berarti menghilangkan kepentingan individu, kelompok, golongan, suku bangsa, atau daerah. Sebaliknya, tujuan Wawasan Nusantara harus sejalan dengan tujuan kedalam, yaitu kepentingan nasional, dan tujuan keluar, yaitu keikutsertaan dalam masyarakat global. Wawasan Nasional Indonesia adalah gagasan yang dipercaya oleh semua orang Indonesia untuk memastikan bahwa tujuan nasional tidak akan terhambat atau menyimpang. Oleh karena itu, Wawasan Nusantara berfungsi sebagai landasan visioner untuk mengatur kehidupan nasional.

E. Wawasan Nusantara Sebagai Paradigma Kebangsaan

Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya sebagai satu kesatuan yang utuh, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sebagai paradigma kebangsaan, Wawasan Nusantara menjadi landasan dalam merumuskan kebijakan nasional yang berorientasi pada keutuhan dan kedaulatan negara. Konsep ini menekankan pentingnya persatuan dalam keberagaman untuk mencapai tujuan nasional seperti keadilan sosial, kesejahteraan bersama, dan ketahanan nasional.

WARGA NEGARA YANG BAIK

Sifat warga negara yang baik berasal dari berbagai aspirasi yang dimiliki oleh kekuatan sosial politik yang ada di masyarakat. Dengan kata lain, pandangan tentang sosok warga negara yang ideal berbeda di negara-negara dengan sistem politik liberal. Demikian juga, di Indonesia, yang memiliki sistem politik yang lebih komunitarian, pandangan tentang sosok warga negara yang ideal tentu berbeda. Para ahli telah banyak berusaha untuk memahami apa itu warga negara yang baik. Oleh karena itu, ada banyak pendapat yang berbeda tentang apa yang dianggap sebagai warga negara yang baik. Selain itu, ada perbedaan pendapat tentang tatanan bermasyarakat dan bernegara yang dianggap baik.

(Derek Heater, 2004). ⁴Warga negara yang baik itu ukurannya adalah konstitusi negara yang bersangkutan. Sepanjang warga negara itu sikap dan perilakunya tidak

⁴ Derek Heater, 2004. *A Brief History of Citizenship*. New York: New York University

bertentangan dan mematuhi konstitusi maka ia berkategori warga negara baik, sementara manusia atau orang yang baik pada dasarnya sama di semua negara, karena ia ditentukan oleh hati nuraninya. Jadi warga negara yang baik belum tentu manusia yang “baik”.

Terdapat 5 syarat warga negara yang dapat dikatakan warga negara yang baik yaitu:

1. kemampuan warga negara dalam mengelaborasi pemahaman tentang demokrasi dan Keberagaman.
2. Kapasitas warga negara untuk berpartisipasi secara demokratis
3. Hubungan yang aktif dengan sesama warga negara
4. Keinginan warga negara untuk melakukan reformasi atau perubahan
5. Kemampuan dan kemauan seseorang atau warga negara untuk melakukan dialog

Menurut Suyato et al., (2016: 148) ⁵Mengungkapkan ada 5 sikap yang perlu dikembangkan dalam upaya membentuk warga negara yang baik diantaranya: sikap peduli, bertanggung jawab, mandiri, demokratis dan kritis. Upaya pembentukan warga negara yang baik dapat dilakukan dengan memberikan pemahaman, pengetahuan yang menekankan sikap kejujuran, integritas, disiplin, dan kerja keras. Hal tersebut sangat relevan dalam kehidupan bermasyarakat, sikap-sikap seperti itu memang harus ditanamkan pada setiap individu warga negara. Contohnya: membuang sampah pada tempatnya, mengambil sampah yang berserakan di tempat umum, ikut berkontribusi dalam program donor darah, mematuhi hukum dan lain sebagainya. Program seperti inilah yang harus diterapkan di Indonesia, sehingga warga negara Indonesia dapat berkontribusi dan memosisikan diri serta bertanggung jawab sebagai individu warga di suatu negara.

C. Peran Masyarakat Yang Baik

Peran masyarakat dalam mewujudkan negara yang baik dapat diterapkan dengan pertama berpartisipasi dalam kegiatan yang diselenggarakan warga yang dimana Warga ataupun masyarakat yang baik akan turut ikut serta dalam berbagai kegiatan di lingkungan sekitar, seperti gotong royong, jaga malam, kegiatan keagamaan, atau aktivitas sosial lainnya. Hal ini mencerminkan kepedulian dan rasa kebersamaan dengan sesama warga. Kedua menaati dan ikut serta aturan yang telah dibuat oleh pemerintah maksudnya setiap individu sebagai warga negara wajib menaati peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah, seperti tertib berlalu lintas, menjaga lingkungan tetap bersih, dan menghindari perbuatan yang dapat merugikan orang lain. Selain itu, masyarakat juga dianjurkan untuk mendukung berbagai program pemerintah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan bersama.

Ketiga melakukan pekerjaan dengan baik, dalam pekerjaan apapun setiap orang perlu menjalankannya dengan penuh tanggung jawab dan kesungguhan. Melalui sikap profesional dan kejujuran dalam bekerja, masyarakat turut berkontribusi dalam

⁵ Suyato et al., (2016: 148)

memajukan negara. Keempat menjadi pelajar yang baik seperti belajar dengan baik maksudnya pelajar memiliki peran penting sebagai warga negara yaitu dengan cara belajar secara sungguh-sungguh. Proses pendidikan yang dijalani akan membentuk mereka menjadi individu yang siap untuk menjadi pemimpin atau tenaga profesional di masa depan.

Kelima dalam keluarga mendidik anak agar sehat jasmani, rohani, ekonomi dan pendidikan berjiwa besar dalam lingkungan selalu bersosialisasi artinya peran keluarga sangatlah penting dalam membentuk sikap anak. Orang tua perlu mengajarkan dan mendidik anak-anak untuk menjaga kesehatan fisik dan mental, memberikan pendidikan yang layak, membiasakan kemandirian secara ekonomi, serta menanamkan sikap sosial yang baik seperti peduli terhadap sesama dan suka bekerja sama. Keenam dan yang terakhir ialah mengikuti pemilu, membayar pajak, menjadi tokoh agama, dan bertoleransi dalam agama. Masyarakat yang bertanggung jawab berperan aktif ikut serta dalam pemilihan umum, melaksanakan kewajiban dalam membayar pajak tepat waktu, menjadi tokoh yang membawa nilai-nilai positif dalam kehidupan beragama, serta menjunjung tinggi sikap saling menghargai antarumat beragama. Toleransi itu sangat dibutuhkan demi bertujuan menciptakan kehidupan yang rukun dan damai.

D. Ciri – Ciri Warga Negara Yang Baik

1. Patriot

Patriotisme berasal dari kata "patriot", yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti seseorang yang mencintai dan membela tanah air, atau dikenal sebagai pejuang sejati. Dalam Kamus Hukum yang ditulis oleh Dr. Andi Hamzah, S.H., istilah "patriot" dijelaskan sebagai individu yang mencintai tanah air dan menjadi pejuang bangsa (Suprpto dkk, 2007:38; Martini et al., 2019). Kata "patriotisme" sendiri terbentuk dari "patriot" dan akhiran "-isme" yang mengandung arti semangat kepahlawanan atau jiwa pahlawan. Dalam bahasa Inggris, istilah ini setara dengan "heroism" dan "patriotism", yang menggambarkan sikap berani, tidak mudah menyerah, serta siap berkorban—baik harta, jiwa, maupun raga—demi bangsa dan negara. Patriotisme merupakan cerminan dari cinta tanah air yang mendalam, yang mendorong seseorang untuk rela berkorban demi kepentingan bangsanya (Budiyanto, 2007:32). Menurut KBBI, perjuangan didefinisikan sebagai "perkelahian untuk merebut sesuatu melalui peperangan". Sementara itu, Soekanto (2009:212) dalam bukunya Sosiologi Suatu Pengantar, menyebutkan bahwa perjuangan adalah bentuk dinamis dari suatu kedudukan atau status (Santoso, Karim, et al., 2023b).

2. Loyal terhadap bangsa dan Negara

Loyalitas terhadap bangsa dan negara mencerminkan kesetiaan yang mendalam dan komitmen untuk mendahulukan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Berikut adalah penjabaran ulang dari ciri-ciri warga negara yang loyal pertama Menjunjung Tinggi Konstitusi, seorang warga negara yang loyal senantiasa menghormati dan mematuhi hukum serta peraturan yang berlaku. Kedua Membela Negara, kesetiaan kepada negara tercermin dalam kesiapan warga negara untuk

melindungi dan mempertahankan kedaulatan serta keutuhan wilayahnya dari berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri. Ketiga Menghormati Simbol Negara, menghargai lambang-lambang negara seperti bendera Merah Putih, lagu kebangsaan "Indonesia Raya", dan lambang Garuda Pancasila merupakan bentuk nyata dari loyalitas. Keempat Berpartisipasi dalam Pembangunan, warga negara yang loyal aktif berkontribusi dalam pembangunan nasional, baik melalui pekerjaan, pendidikan, maupun kegiatan sosial.

3. Toleran beragama

Istilah toleransi merupakan konsep modern, baik dalam hal penyebutan maupun maknanya. Konsep ini pertama kali berkembang di dunia Barat, dipengaruhi oleh situasi politik, sosial, dan budaya yang khas di wilayah tersebut. Kata toleransi berasal dari bahasa Latin *tolerantia*, yang mengandung makna seperti kelonggaran, kesabaran, kelembutan hati, dan keringanan. Dari pengertian ini, toleransi dapat dipahami sebagai sikap memberikan ruang sepenuhnya kepada orang lain untuk menyampaikan pandangannya, meskipun pandangan tersebut berbeda atau dianggap keliru.

Secara etimologis, istilah toleransi juga dikenal luas di Eropa, khususnya saat Revolusi Perancis, yang mengusung semboyan kebebasan, persamaan, dan persaudaraan—ketiganya memiliki hubungan erat dengan semangat toleransi. Umumnya, toleransi mengacu pada sikap terbuka, lapang dada, penuh kesukarelaan, dan kelembutan. Kevin Osborn menyatakan bahwa toleransi adalah salah satu pilar utama dalam sistem demokrasi, sebab demokrasi hanya dapat berjalan jika setiap individu mampu menahan egonya dan menghargai pandangan orang lain.

4. Demokratis

Secara etimologis, kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yakni dari kata "demos" yang berarti rakyat atau penduduk, dan "cratein" atau "cratos" yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Dengan demikian, gabungan dari keduanya—*demoscratein* atau *demoscrotos*—mengandung makna bahwa kekuasaan berada di tangan rakyat. Artinya, rakyat memiliki wewenang tertinggi dalam pengambilan keputusan, pemerintahan dijalankan oleh rakyat dan untuk rakyat. Joseph A. Schmitter mendefinisikan demokrasi sebagai suatu sistem institusional yang dirancang untuk mencapai keputusan politik, di mana individu memperoleh kekuasaan melalui proses kompetitif dalam meraih dukungan rakyat. Sementara itu, Sidney Hook menyebutkan bahwa demokrasi merupakan bentuk pemerintahan yang keputusan-keputusan pentingnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, didasarkan atas persetujuan mayoritas rakyat yang diberikan secara bebas kepada warga dewasa.

Plamenatz menjelaskan demokrasi sebagai "government by person freely chosen by and responsible to the governed," yaitu suatu pemerintahan yang dipilih secara bebas oleh rakyat dan bertanggung jawab kepada mereka yang memilih. Di sisi lain, Philipp C. Schmitter mengemukakan bahwa demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana penguasa diminta pertanggungjawaban atas tindakan-tindakannya di ruang publik oleh warga negara, yang bertindak secara tidak langsung melalui kompetisi dan kolaborasi para wakil rakyat yang dipilih. Dari beragam pendapat para ahli tersebut, terdapat tiga

prinsip utama yang menjadi dasar tumbuhnya demokrasi, yaitu kebebasan, kesetaraan, dan kedaulatan suara mayoritas.

Hakikat demokrasi yang sejati terlahir dari pengakuan atas hak-hak setiap individu yang wajib dihormati dan dijalankan. Meskipun istilah demokrasi telah dikenal sejak lama, penerapan nilai-nilai hakiki dari demokrasi tidak serta-merta terjadi. Demokrasi yang sebenarnya baru dapat terbentuk apabila terdapat kebebasan yang disertai tanggung jawab, serta pengakuan atas hak asasi setiap individu. Demokrasi tidak hanya berkaitan dengan kesetaraan kelompok, atau pengumpulan kekuatan sosial yang beragam, tetapi menekankan pada penghormatan terhadap hak-hak personal secara menyeluruh.

Globalisasi

Globalisasi adalah proses integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran, dan aspek kebudayaan lainnya. Kemajuan infrastruktur transportasi dan telekomunikasi, termasuk kemunculan telegraf dan internet, merupakan salah satu factor utama dalam globalisasi yang semakin mendorong saling ketergantungan (interdependensi) ekonomi dan budaya. Sehingga globalisasi merupakan pemadatan dunia dan pemerdayaan kesadaran dunia secara keseluruhan. (Roland Robertson, 1992: 16).⁶

Globalisasi adalah proses di mana masyarakat di seluruh dunia dapat berkomunikasi satu sama lain atau saling terhubung dalam berbagai bidang kehidupan, seperti teknologi, politik, budaya, ekonomi, dan lingkungan. Saat ini, globalisasi masih berlangsung. Dengan bantuan internet, Anda dapat dengan mudah mengetahui nilai-nilai kebudayaan negara lain.

- a. Abad ini mengedepankan ilmu pengetahuan sebagai handalan manusia untuk memecahkan problem kehidupannya, dengan demikian abad ini akan melahirkan masyarakat belajar (*learning society*) atau masyarakat ilmu pengetahuan (*knowledge society*). Keunggulan manusia atau suatu bangsa akan dikaitkan dengan keunggulan bangsa tersebut dalam bidang ilmu pengetahuan.
- b. Di era ini akan muncul dunia tanpa batas (*borderless world*). Sekat-sekat geografis menjadi semu sebagai akibat dari kemajuan ilmu komunikasi dan informasi. Peristiwa apa saja yang terjadi disuatu belahan dunia dalam waktu yang hampir bersamaan akan diketahui di belahan dunia lainnya.
- c. Era ini juga memunculkan persaingan global, akan muncul era kompetitif. Apabila era persaingan muncul maka diperlukan manusia-manusia unggul.
- d. Era ini akan memunculkan teknologi jarak jauh seperti *teleconference*, internet, serta media-media komunikasi teknologi pembelajaran modern lainnya, dalam bentuk *global education*.
- e. Era ini akan memunculkan pergaulan manusia yang berdasarkan multikultural. Manusia hidup dalam lintas budaya, ras, etnik, bahasa, dan agama.

⁶ Roland Robertson, 1992: 16

Dampak positif dan negatif dari globalisasi di bidang politik, dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Masyarakat dapat menggunakan hak berpolitik dengan bebas, Hak Asasi Manusia semakin diakui keberadaannya, Masyarakat dapat menggunakan haknya secara langsung. Dampak negatif globalisasi terhadap bidang politik. Musyawarah sebagai proses demokrasi semakin ditinggalkan, Masyarakat cenderung mementingkan kepentingan kelompok dari pada kepentingan umum, Sering terjadi aksi anarkis yang sulit dihindari. Dampak negatif globalisasi pada bidang ekonomi kemiskinan dan kesenjangan global, krisis pangan dunia, menghambat pertumbuhan sektor industri.

Dampak positif globalisasi pada bidang ekonomi. Produksi global yang dapat ditingkatkan, meluaskan pasar untuk produk produk dalam negeri, mensejahterakan masyarakat.

Dampak positif globalisasi pada bidang sosial

Meningkatkan standar kerja yang tinggi, seperti disiplin, suka bekerja keras, kemandirian, rasional, dan sportif. Kemajuan teknologi membuat kehidupan sosial ekonomi lebih efisien, produktif, dan efisien, sehingga produksi domestik dapat bersaing di pasar global. Kualitas hidup yang lebih baik. Dapat memperoleh sumber daya keuangan yang lebih besar dan teknologi yang lebih canggih. Memperluas pasar untuk produk domestik. Kemajuan dalam teknologi, komunikasi, data, dan transportasi yang membuat kehidupan lebih mudah. Bepergian dengan cepat (mobilitas tinggi). Mudah mendapatkan informasi dan pengetahuan. Peningkatan wisata dan pariwisata.

Dampak negatif globalisasi pada bidang sosial

Nilai-nilai Barat semakin masuk ke Indonesia melalui internet, media televisi, dan media cetak yang banyak ditiru oleh masyarakat. Semangat gotong-royong, solidaritas, kepedulian, dan kesetiakawanan sosial semakin menurun sehingga hanya segelintir orang yang dapat menangani situasi darurat seperti sakit, kecelakaan, atau musibah. Maraknya penyelundupan barang ke Indonesia. Perusahaan dalam negeri lebih tertarik bekerja sama dengan perusahaan asing, timbulnya sikap mementingkan diri sendiri (individualisme), munculnya sikap sekularisme, yang lebih mementingkan gaya hidup duniawi dan mengabaikan prinsip agama. Munculnya gaya hidup boros dan mewah, karena status seseorang di masyarakat diukur berdasarkan seberapa kaya dia.

1. Terjadi ketimpangan pembangunan yang signifikan, yang menyebabkan kesenjangan ekonomi semakin besar, baik antar wilayah dalam suatu negara maupun antar sektor ekonomi.
2. Banyak negara, khususnya di kawasan Selatan, mengabaikan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin.
3. Perputaran modal jangka pendek yang sangat cepat dan tidak stabil muncul akibat praktik baru yang memperlakukan uang sebagai komoditas untuk meraih keuntungan

4. Tingkat pengangguran terus meningkat, bahkan di negara-negara maju, bersamaan dengan semakin lebarnya kesenjangan pendapatan.
5. Budaya konsumtif semakin meluas, bertentangan dengan nilai-nilai spiritual dan moral, serta menurunkan nilai kemanusiaan.
6. Munculnya budaya global yang seragam (homogen), dipengaruhi oleh kekuatan korporasi transnasional dan media global.
7. Tersedianya akses yang lebih luas untuk memperoleh informasi serta menyebarkan pengetahuan berkat kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Proses komunikasi menjadi lebih sederhana dan biaya yang dibutuhkan pun lebih rendah.
8. Terdapat lebih banyak peluang bagi individu dari berbagai latar belakang etnis, budaya, dan agama untuk saling berinteraksi.
9. Meningkatnya peluang untuk menumbuhkan empati dan solidaritas kemanusiaan terhadap para korban bencana alam maupun tragedi akibat ulah manusia di berbagai belahan dunia.
10. Munculnya dorongan untuk menegakkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, seperti akuntabilitas publik, supremasi hukum, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Kesimpulan

Makalah ini menegaskan bahwa wawasan nusantara memiliki peran penting dalam membangun warga negara yang baik di era globalisasi. Dimana wawasan nusantara menekankan persatuan, kesatuan untuk mencapai tujuan nasional yang adil dan Makmur. Dalam menghadapi globalisasi, wawasan nusantara berfungsi sebagai pedoman bagi masyarakat agar tetap memelihara jati diri bangsa, nilai-nilai Pancasila, kedaulatan negara. Serta warga negara yang baik berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat, dan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karena itu, penting bagi setiap warga negara untuk menerapkan nilai-nilai wawasan nusantara dalam menghadapi tantangan global.

Referensi

- Adhirajasa Putra Pringadhi & Fatma Ulfatun Najicha 2023, DINAMIKA WAWASAN NUSANTARA DALAM MENGHADAPI ERA GLOBALISASI, *Jurnal Global Citizen: Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan* volume 12 nomor 2 hal:89-97.
- Derek Heater., 2004. *A Brief History of Citizenship*. New York: New York University.
- Habib, M., Siagian, H. A. H., Ginting, A. N. I. B., Febrina, S., Dany, C. N. K., Octavelia, A. T., Sari, A. R., Manurung, L. N., Febrian, A., Khairunnisa, T. Z., Dhanty, K. F., & Siregar, R. M. (2022). Peranan Masyarakat Desa Namo Gajah dalam Mewujudkan Good Citizenship. *PENDIS: Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*.
- Johannes johny koynja 2022, SOSIALISASI EMPAT PILAR BERBANGSA DAN BERNEGARA DI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA YADINU

- MASBAGIK KECAMATAN MASBAGIK LOMBOK TIMUR, *jurnal komplikasi hukum* volume 7 nomor 2,283-300.
- Prasetyo, D., Danurahman, J., & Hermawan, H. (2023). *Implementasi Pendidikan Kewarganegaraan dalam Mewujudkan Warga Negara Baik dan Cerdas*. *Harmony*, 8(1), 15-23. Universitas Negeri Semarang.
- Suko Wiyono 2019, EMPAT PILAR KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA SEBAGAI PANDUAN DALAM MEWUJUDKAN MASYARAKAT ADIL MAKMUR BERDASARKAN PANCASILA *jurnal ilmiah Fakultas keguruan dan ilmu pendidikan* volume 15 nomor 1 hal 37-52.
- Yuniar Mujiwati Serba serbi wawasan kebangsaan Lembaga academia & research institute perum Sekar indah II,2020:30.
- Martini, E., Kusnadi, E., Darkam, D., & Santoso, G. (2019). Competency Based Citizenship 21st Century Technology in Indonesia. *International Journal of Recent Technology and Engineering*, 8(1C2), 759–763. <https://doi.org/10.35940/ijrte.b1483.0882s819>
- Santoso, G., Karim, A. A., Maftuh, B., & Murod, M. (2023b). Kajian Identitas Nasional melalui Misi Bendera Merah Putih , dan bahasa Indonesia Abad 21. *Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra)*, 02(01), 284–296.
- Gafur, A., Mutholingah, S., & Munir, M. (2021). Membangun sikap toleran dan demokratis melalui pendidikan Agama Islam. *Ta'limuna*, 10(2), 83–101.